

KOORDINASI PENCEGAHAN **KORUPSI** PENGELOLAAN PI 10%

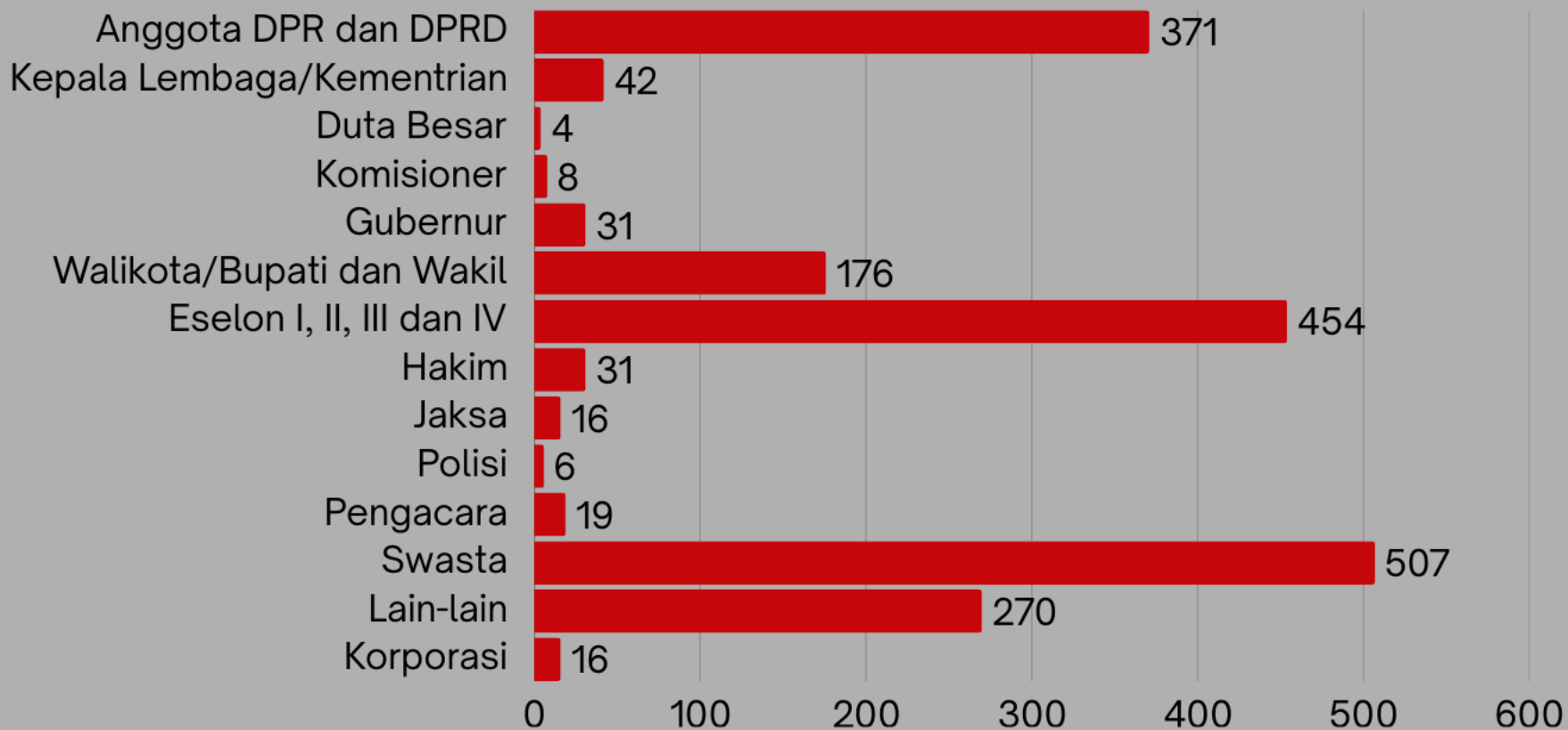
DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH I





DATA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PROFESI PELAKU

DATA TAHUN 2004 - 2025 | SUMBER: KPK RI



JENIS TIPIKOR

(UU NO.31/1999 JO. UU NO. 20-2001)



Kerugian Keuangan Negara
Ps. 2, Ps. 3
(Penyalahgunaan Wewenang)



Suap-menyuap
Ps. 5(1) a, b; Ps. 13; Ps. 5(2); Ps. 12 a, b; Ps. 11, Ps. 6(2); Ps. 12 c,d



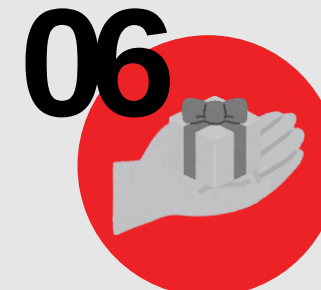
Penggelapan dalam Jabatan
Pasal 8; 9; 10 a, b, c



Pemerasan
Pasal 8; 9; 10 a, b, c



Perbuatan Curang
Ps. 7(1) a, b, c, d; Ps. 12 h



Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i



Gratifikasi
Pasal 128 jo Pasal 12C



Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Korupsi

1. Merintangi Proses
2. Keterangan Kekayaan
3. Keterangan Rekening
4. Keterangan Palsu
5. Identitas Pelapor

- a.** PI 10% adalah Kebijakan Pemerintah sebagai bagian strategi nasional dalam pengelolaan migas dengan melibatkan daerah penghasil
- b.** Nilai Perolehan PI 10% bagi daerah relatif besar, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah
- c.** Kebijakan PI 10% belum mampu memberikan manfaat yang optimal bagi daerah penerima



DASAR HUKUM

1. UUD 1945
2. UU NO. 22 TAHUN 2001 ttg Minyak & Gas Bumi
diubah dengan UU NO. 6 TAHUN 2023 ttg Cipta Kerja
3. UU NO 19 TAHUN 2019 ttg KPK
4. PP NO. 35 TAHUN 2004 jo. PP NO. 55 TAHUN 2009
ttg kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
5. PERPRES NO. 9 TAHUN 2013 jo. PERPRES NO. 36 TAHUN 2016
ttg penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
6. PERMEN ESDM NO. 37 TAHUN 2016 jo. PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2025
ttg ketentuan penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi



Mengapa PI 10% belum memberikan dampak signifikan untuk daerah ?

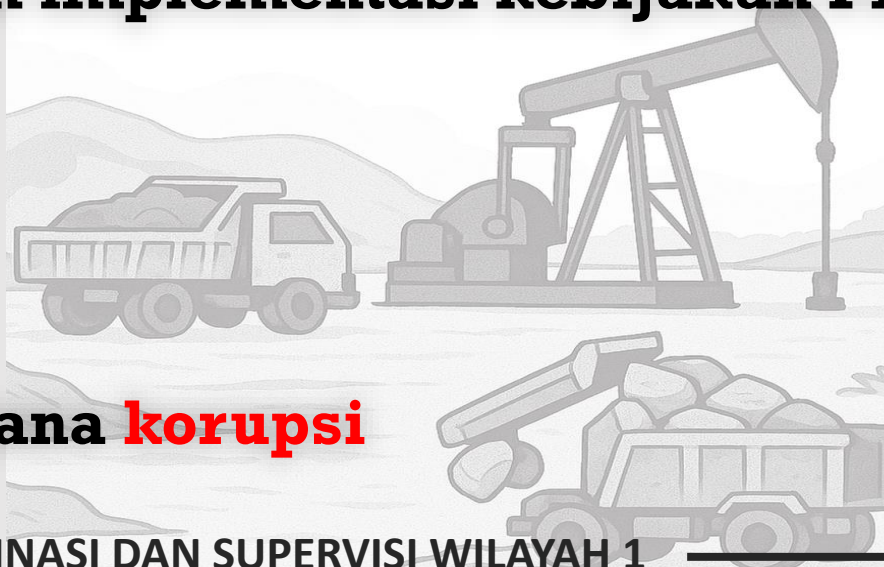
01 Perbedaan persepsi terkait kebijakan PI 10% antara pemangku kepentingan terkait

- ☐ Tempus pelaksanaan hingga penerimaan PI 10%
- ☐ Persentase *cross border reservoir* (Wilayah penerima)
- ☐ Persentase pembagian besaran nilai PI 10% (Pemberi dan penerima PI 10%)

02 Kelemahan tata kelola dalam implementasi kebijakan PI

- ☐ Koordinasi dan Sinergi Kolaborasi
- ☐ Pengawasan dan pengendalian
- ☐ Regulasi
- ☐ Transparansi dan akuntabilitas
- ☐ Sarat konflik kepentingan
- ☐ Strategi pengembangan bisnis

03 Rentan terjadinya tindak pidana korupsi



Dugaan Korupsi PI Blok Mahakam Seperti Menghunus Pedang ke Rakyat Kutai Kertanegara

• 1 jam Lalu 🔥 517 📖 1 minute read



DetakKaltim.Com
Berita Online



HOT NEWS

SIDANG TIPIKOR DIVIDEN BLOK MAHAKAM, JPU HADIRKAN NOTARIS BERSAKSI
Ungkap Pendirian PT Petro TNC Indo Tank

🌐 @DETAKKALTIM.COM 🐦 @DETAKKALTIM 📘 @DETAKKALTIM

Skandal PT SPR Meledak! Eks Dirut dan Direktur Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Ratusan Miliar

Admin
Sabtu, 12 Jul 2025 19:00 WIB



PETIR Desak Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Dana PI di PT BLJ

Novrizon Burman
~ Kamis, 27 Maret 2025 | 11:34 WIB



Dugaan Korupsi PT LEB, DPRD Lampung Akan Panggil Pihak Terkait

Foto: Eka Febriani / Lampung Geh 4 November 2024

KABARLAMPUNG.CO



PIKIRAN ANDA

Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo menjalani pemeriksaan di Kejati Lampung

Dalam kasus korupsi dana Participating Interest (PI) 10% WK OSES sebesar Rp 271.557.614.910.

@kabarlampung.co



02 Juli 2025

Diduga kuat telah terjadi TP.Korupsi dalam Pengelolaan & Penerimaan Dana PI 10% PT.PHR, Tim Jaksa Penyidik lakukan

Penggeledahan

Kantor PT.SPRH (Perseroda) di Bagansiapiapi

Banyuurip.com

Sebut Ada Kerugian Rp 236 Miliar, Kerja Sama PI Blok Cepu Dilaporkan ke KPK



www.suarabanyuurip.com

Foto: Penandatanganan Pengalihan Participating Interest 10 persen antara PGE dan BUMD PT PE Nsb pada Selasa, 29 Agustus 2023 lalu yang berlangsung di halaman Kantor Operasional PT Pema Global Energi (PGE) Point A Kecamatan Nibong

PI 10 % Mandek, Anggota DPRK Minta PGE Tuntaskan, Pj Bupati Surati PGE Pertanyakan Kejelasan Angka

📷 📺 🌐 | lingkarpas
www.lingkarpos.com

"PGE"

Sumber : lingkarpas.com

IDENTIFIKASI ISU SENSITIF

01

Kapasitas produksi lifting sebelum dan sejak dikelola PHR

02

Akuntabilitas kegiatan pengembangan bisnis oleh KKKS

03

Perbedaan laporan hasil produksi migas KKKS

04

Ketidaksesuaian laba bersih KKKS dengan penerimaan PI 10% oleh BUMD

05

Akuntabilitas perhitungan pajak migas oleh KPP Migas untuk KKKS dan BUMD Pengelola

06

Mekanisme perhitungan PI 10% yang menghasilkan perolehan PI 1\$ / Bulan

07

Transparansi komunikasi antara BUMD Penerima - BUMD Pengelola - KKKS

08

Akuntabilitas usaha/bisnis BUMD atau anak perusahaan BUMD Pengelola (Provinsi/Kabupaten)

09

Akuntabilitas pembentukan BUMD dan rekrutmen Direksi BUMD

10

Ketentuan pembagian persentase keikutsertaan saham Provinsi-Kab/Kota
(Pasal 5 (3) Permen ESDM No 1 Tahun 2025)

11

Tempus perhitungan pembagian PI 10%





PROSES PENAWARAN PI

Publikasi terbuka proses penawaran, membuat portal informasi online, dan verifikasi independen.

KELAYAKAN BUMD

Audit status hukum dan keuangan, calon direksi melaksanakan fit & proper test, dan BUMD harus dimiliki mayoritas oleh daerah penghasil.

BENTURAN KEPENTINGAN

Deklarasi benturan kepentingan, aturan mengenai larangan rangkap jabatan, pelaporan gratifikasi ke KPK.

PEMBAGIAN DANA PI

Kajian teknis lembaga independen, publikasi dasar atas pembagian dana PI, keputusan harus diambil berdasarkan data yang transparan.

PEMANFAATAN DANA PI

Audit keuangan tahunan, perlu adanya pengawasan langsung oleh Inspektorat, melaporkan pemanfaatan dana PI kepada DPRD setiap semester.

PERJANJIAN DAN PENGALIHAN PI

Penerbitan regulasi untuk Whistleblowing System (WBS) yang memuat perlindungan pelapor serta sanksi tegas.



SARANA PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar Anda, segera laporkan melalui **email (pengaduan@kpk.go.id)**, **call center (198)**, **aplikasi KPK Whistleblower's system (kws.kpk.go.id)** atau **datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK.**

Masyarakat yang membuat laporan pengaduan (Pelapor) ke KPK akan dijamin dan dilindungi kerahasiaan identitasnya, dengan ketentuan pelapor tidak mempublikasikan laporan pengaduannya sendiri. Jika dibutuhkan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH 1



Komisi Pemberantasan Korupsi

KONTAK KOORSUP WILAYAH I

Kasatgas Koorsup Wil. I: 0821-3490-8441 (Harun Hidayat)

LAYANAN PENGADUAN



198 (Call Center)



pengaduan@kpk.go.id



0811-959-575 (WhatsApp)



Jl. Kuningan Persada Kav. 4 , Jakarta Selatan

